

DUKUNGAN MESIR TERHADAP PERJUANGAN KEMERDEKAAN PALESTINA 2011-2013

Penulis : Iskandar
Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP., MA

Abstract

This study illustrates Egypt's foreign policy , particularly in view of the struggle for Palestinian independence . Since Muhammad Mursi served as President of Egypt Egypt's foreign policy towards more pro towards the Arab and Islamic world especially those of the Palestinians . Unlike the previous President Husni Mubarak more pro Israel and the West . During Mursi led the Egyptians many policies taken Mursi in support of the Palestinian struggle for independence

This study uses a constructivist paradigm strengthened with the theory of foreign policy . That the measures taken of a country can not be separated from national interests and become the rationale for the decision. The method used in this study is a qualitative research method .

Based on information from various sources that the authors get , seeing that the foreign policy of Egypt in support of the Palestinian struggle for independence caused the closeness of ideology between the Muslim Brotherhood in Egypt with Hamas in Palestine . So it is natural that Egypt was really supports Palestinian Ideology because closeness between the two countries .

Keywords : Muslim Brotherhood , Hamas , Foreign Policy , Ideology , Organization

Pendahuluan

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang saat ini sangat menarik untuk dikaji bagi para pengamat politik hubungan internasional. Pasalnya negara-negara arab hampir semuanya melakukan revolusi. Mulai dari Tunisia hingga sampai ke Mesir dan Suriah yang sampai saat ini belum selesai. Sebagian pengamat menyebut revolusi di kawasan Timur Tengah sebagai "Musim Semi" Arab. Banyak alasan yang mendorong negara-negara arab untuk melakukan revolusi salah satunya ialah karena terlalu terkungkung oleh kekuasaan yang otoritarian.

Pasca revolusi, negara-negara Arab berlomba-lomba mengubah sistem politiknya. Kawasan ini telah menjadi kawasan dimana negara-negara Arab mentransformasi sistem politiknya dari sistem otoritarian kepada sistem politik demokrasi. Ironisnya perubahan sistem politik demokrasi di arab tidak membuat negara-negara arab semakin dekat kepada Amerika Serikat dan Barat.¹ Salah satu negara Arab yang

¹ Demokrasi merupakan sistem politik yang dipelopori oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II hingga masa Perang Dingin. Amerika Serikat mencoba menanamkan sistem demokrasi di negara-negara lain untuk memperkuat hegemoninya. Harapannya negara yang menganut sistem demokrasi akan mau bekerjasama dan menjalin persahabatan dengan Amerika Serikat. Harapan ini benar-benar terjadi dimasa Perang Dingin, akan tetapi tidak berlaku dimasa pasca Revolusi Arab.

paling mencolok dari perubahan sikap terhadap AS dan Barat adalah Mesir.

Masa pemerintahan Muhammad Mursi, Mesir tidak mendekati diri kepada AS dan Barat tetapi mendekati diri kepada negara-negara Arab dan negara-negara Islam lainnya. Salah satu negara yang menjadi fokus Mesir adalah Palestina. Isu Palestina bahkan menjadi isu utama dalam politik luar negeri Mesir. Mesir sangat mendukung kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

Masa pemerintahan Muhammad Mursi sangat berbeda dari pemerintahan Husni Mubarak. Pada masa kepemimpinan Husni Mubarak arah kebijakan luar negeri Mesir lebih pro ke arah Amerika Serikat (AS), Israel dan Barat (negara-negara Eropa). Banyak dari kebijakan luar negeri Mesir yang mendukung kepentingan Israel dan AS di Timur Tengah. Salah satu dukungan Mesir ialah dalam memperkuat hegemoni AS untuk kawasan Timur Tengah.

Mesir dimasa Husni Mubarak juga ikut dalam menjamin terlaksananya kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina. Diantaranya mengenai pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina. Peran penting yang dimainkan Husni Mubarak sebagai Presiden Mesir ialah mengikis kemarahan negara-negara arab untuk bersatu dan menyerang Israel. Setidaknya negara-negara Arab tidak mengecam karena Mesir terlihat berusaha membantu jalur diplomasi antara Palestina-Israel. Disisi lain Israel telah menempatkan penduduknya di kawasan Palestina lebih dari 10.000

pemukiman tepatnya diwilayah Tepi Barat.²

Hubungan Diplomatik Dan Kerjasama Mesir-Palestina

Hubungan antara Mesir dan Palestina telah terjalin cukup lama dan dinamis. Hingga sekarang Mesir tetap menjaga hubungan yang erat dengan Palestina dan mengupayakan perjuangan kemerdekaan Palestina atas pendudukan Israel. Hubungan Mesir-Palestina terjadi secara bilateral antara Republik Arab Mesir dengan Otoritas Palestina (*Palestina Authority*). Palestina tidak bisa dipisahkan dari identitas Arab Islam yang membuat Mesir secara umum tetap mendukung perjuangan kemerdekaan negara tersebut. Penduduk Palestina memiliki kedekatan historis dengan penduduk Mesir baik secara sosial, politik, maupun hubungan ekonomi, Mesir sempat mengawasi wilayah Palestina sebelum akhirnya Israel menduduki Palestina sejak tahun 1967. Dinamika hubungan Mesir-Palestina juga telah melibatkan banyak pihak, terutama dari Ikhwanul Muslimin yang secara konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Era Gamal Abdul Nasser, Isu pembebasan tanah Arab Palestina menjadi salah satu sasaran politik luar negeri pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Kolonel Gamal Abdul Nasser adalah pendukung kuat untuk kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Nasser adalah pemimpin kelompok anti-Inggris yang berasal dari kalangan militer, Nasser berhasil mengukudeta raja Faruq dan menghapus kerajaan yang sebelumnya menguasai Mesir. Nasser kemudian mendirikan negara Mesir yang berbentuk Republik yang semula

² Pilihan Israel Pasca Runtuhnya Mubarak
<http://www.voiceofpalestine.net/artikel/wawasan/309-pilihan-israel-pasca-runtuhnya-mubarak.html> diakses pada 12 Januari 2013

dilatarbelakangi revolusi Mesir tahun 1952.

Sejarah hubungan antara Mesir dan Palestina dimulai setelah revolusi Mesir tahun 1952. Orang-orang Arab Palestina menganggap Gamal Abdul Nasser adalah orang yang bisa mengalahkan Israel sehingga mereka menaruh simpati dan mendukung Gamal Abdul Nasser. Selama KTT Liga Arab pada bulan Januari 1964, Nasser memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi sebagai perwakilan dari rakyat Palestina. Kemudian pada bulan Mei 1964 terbentuklah *Palestinian Liberation Organization* (PLO) atau Organisasi Pembebasan Palestina yang mewadahi berbagai faksi yang ada di Palestina. PLO mendapat dukungan besar dari Nasser.³

Setelah Nasser meninggal, **Muhammad Anwar Al-Sadat** kemudian menjadi pemimpin Mesir, sebelumnya Anwar Sadat berposisi sebagai wakil presiden mendampingi Nasser. Mesir di bawah kepemimpinan Anwar Sadat menunjukkan arah sikap politik luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, Anwar Sadat menunjukkan sikap politik luar negeri yang inferior terhadap Israel dan sekutunya, Amerika Serikat. Anwar Sadat telah menjadikan Palestina memiliki posisi tawar yang lemah dan lebih mengupayakan upaya-upaya diplomatis walau kemudian dianggap gagal bagi dunia Arab dan Islam.

Dalam masa Sadat, peperangan dengan Israel tetap berlanjut namun pada beberapa tahun setelah Sadat menjabat, urusan dengan Israel telah didekatkan dengan berbagai upaya kerja sama. Di masa Sadat, peperangan yang pernah berlangsung antara Mesir dengan Israel adalah Perang Yom

Kippur di tahun 1973, Yom Kippur adalah hari paling suci bagi orang Yahudi, dan di hari tersebut Mesir dan Suriah melakukan serangan, perang ini tidak menambah atau mengurangi wilayah yang diklaim Israel sejak tahun 1967.

Kekuasaan Anwar Sadat berakhir tahun 1981 ketika ia ditembak oleh Asy-Syahid Khalid Al-Islambuli pemimpin misterius yang disebut-sebut berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah dan Al Jihad, sebuah organisasi jihadi yang awalnya berkembang di Mesir.⁴ Kekosongan pemerintahan dimanfaatkan wakil presiden Husni Mubarak. Kebijakan dalam negeri maupun luar negeri pada masa Mubarak tidak banyak berbeda dari pendahulunya.

Husni Mubarak, dalam isu Palestina secara umum hanya melanjutkan proses damai dan menunjukkan sikap kooperatif dengan Israel. Namun, pada masa kepemimpinan Husni Mubarak inilah Palestina diakui secara resmi dunia internasional yakni pada tanggal 15 November 1988, dan Mesir juga menjadi negara pertama yang mendukung Deklarasi Kemerdekaan Palestina.

Selama hampir tiga puluh tahun Mubarak memimpin Mesir, politik luar negeri terutama yang berkaitan dengan isu Palestina tidak berbeda dari pendahulunya. Mubarak tetap menjaga komitmen perjanjian *Camp David*, hubungan dengan Israel tetap terjalin walau banyak yang menilai bahwa hubungan itu terjalin cukup dingin terutama jika melihat provokasi yang selalu dilakukan Israel terhadap kawasan Palestina yang menumbuhkan simpati terhadap Palestina salah satunya

³ *Relations Egypt-Palestine*, dalam <http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/Qalb-i-Abid-&-Massarrat-Abid.pdf> [diakses pada 28 Oktober 2013]

⁴ Abu Mush'ab As-Suri, penerj. Agus Suwandi, *Perjalanan Gerakan Jihad (1930-2002), Sejarah Eksperimen, dan Evaluasi*, Jazera, Solo: 2009. Hal. 126

dari Mesir. Mubarak berulang kali mengupayakan adanya pembicaraan damai antara Palestina dan Israel.

Pada tahun 2011 negara-negara Arab mengalami fase pergolakan dan pemberontakan yang dikenal dengan Musim Semi Arab (*Arab Spring*).⁵ Mesir juga merasakan imbas *The Arab Spring*, di Mesir terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut mundurnya Husni Mubarak yang telah lima kali berturut-turut memenangi pemilu di Mesir yang dianggap tidak bersih. Kemudian pasca revolusi 2011 terpilihlah Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir melalui pemilu demokratis.

Era Muhammad Mursi, Politik luar negeri Mesir untuk Palestina semakin berkembang setelah Mesir berada di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi. Pada tahun 2012 atau ketika Muhammad Mursi memimpin Mesir, perbatasan Mesir-Palestina kembali dibuka, dan rakyat Palestina diizinkan untuk memasuki Mesir tanpa visa. Sembari membela hak-hak rakyat Palestina, Mesir dengan dukungan pihak pertahanan terus mengkritik operasi militer yang dilakukan Israel di Gaza.⁶ Perbatasan Rafah dibuka selama 12 jam, dan dibuka enam kali dalam seminggu, dan penduduk Gaza yang berusia antara 18-40 tahun harus melapor untuk dapat melintasi perbatasan tersebut, sementara wanita dan anak-anak tidak perlu melapor. Mereka yang menggunakan perbatasan untuk tujuan berdagang dalam skala besar masih dipertimbangkan untuk dapat melintasi perbatasan tersebut.

⁵ *The Blockade Timeline*, dalam www.icsresources.org, [diakses pada 10 November 2013]

⁶ Middle East Policy Council, *Egypt Opens Its Border with Gaza*, dalam <http://www.mepc.org/articles-commentary/commentary/egypt-opens-its-border-gaza?print>, [diakses pada 7 November 2013]

Duta besar Mesir untuk Israel ditarik dan duta besar Israel untuk Mesir mendapat protes resmi dari Mesir. Dan orang yang ada di balik dukungan nyata Mesir ini adalah presiden terpilih hasil pemilu, Muhammad Mursi. Mursi terpilih menjadi presiden Mesir pada 8 Juli 2012. Mursi pernah menyatakan bahwa “*The Israelis must realise that this aggression is unacceptable and would only lead to instability in the region*”. Liga Arab mendukung protes terhadap Israel dengan melakukan serangkaian pertemuan dan meminta dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

Semenjak Mursi berkuasa, hubungan Mesir-Palestina sangat aktif, selain membuka kembali perbatasan Rafah, pada 29 November 2012, Mesir juga mendukung Palestina menjadi anggota PBB dengan upaya voting *United Nations General Assembly resolution 67/19*. Keputusan resolusi tersebut menjadikan Palestina sebagai salah satu peninjau non-anggota di PBB, posisi tersebut sama seperti Vatikan.

Dibukanya kembali perbatasan Rafah menunjukkan keberhasilan kebijakan luar negeri Mursi, karena dianggap lepas dari tekanan Israel. Dibukanya kembali perbatasan memudahkan penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 1.5 juta orang mendapatkan akses ke dunia yang lebih luas, karena selama ini mereka merasa di blokade oleh Israel dan dihalang-halangi oleh Mesir. Terbukanya kembali perbatasan Rafah menurut Alan Phils, penulis harian di *The National*, UEA, menunjukkan adanya gap antara Mesir dan Israel, dan menunjukkan sinyal bahwa politik luar negeri Mesir telah berubah dan Mesir akan bertindak tanpa harus berkonsultasi dulu dengan Israel.⁷

⁷ *Ibid.*

Masyarakat Palestina terutama Gaza menyadari bahwa mereka menaruh harapan yang besar pada Mursi, yang akan lebih simpati dengan mereka, dan memiliki kedekatan ideologis dengan organisasi nomor satu di Gaza, HAMAS. Diakui Mesir, bahwa pembukaan perbatasan Rafah belum mengakhiri blokade terhadap Gaza, namun ini menunjukkan perubahan yang signifikan.

Politik domestik Mesir mengalami kekisruhan di tahun 2013 yang menyebabkan Mursi harus mundur dari jabatan. Turunnya Mursi dari presiden menyebabkan militer kembali berkuasa di Mesir. Perubahan politik domestik ini kemudian mempengaruhi urusan luar negeri Mesir seperti isu Palestina.

Tak lama setelah penggulingan Mursi pada 3 Juli 2013, militer kembali menutup perbatasan Rafah, dengan alasan terjadi penembakan terhadap 20 orang polisi di dekat perbatasan dan pelakunya diduga dari militan HAMAS.⁸ Peristiwa ini menjadi perhatian karena selama masa Mursi memimpin, perbatasan Rafah dilewati 1200 orang tiap harinya. Penutupan kembali perbatasan Rafah diduga dipengaruhi pihak lain terutama Israel, dan HAMAS memiliki hubungan yang tidak baik dengan pemerintahan Mesir yang berasal dari latar belakang militer.

Peran Ikhwanul Muslimin Terhadap Dukungan Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina semenjak organisasi ini didirikan tahun 1928. Ikhwanul Muslimin ikut dalam pasukan militer di masa Gamal Abdul Nasser dalam Perang tahun 1948

melawan Israel. Ikhwanul Muslimin tetap mendukung perjuangan Palestina walau organisasi ini selalu berlawanan dengan pemerintah Mesir. Ekspansi Ikhwanul Muslimin ke berbagai negara di luar Mesir telah menjadikan organisasi ini semakin besar, pada tahun 1987 berdiri partai Hamas di Palestina yang merupakan sayap Ikhwan Muslimin. Kehadiran Hamas membuat Ikhwanul Muslimin semakin merasa terikat dengan perjuangan rakyat Palestina. Pada tahun 2012, partai politik Ikhwanul Muslimin di Mesir, *Free and Justice Party* (FJP), menguasai Parlemen dan berhasil mengantarkan kader partainya Muhammad Mursi, sebagai Presiden Mesir hasil pemilu demokratis pertama di Mesir. Setelah pemerintahan Mesir dapat dipegang kader-kader Ikhwanul Muslimin, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin besar dan mendapat legitimasi kuat dari negara.

Persebaran Ikhwanul Muslimin

Gerakan Ikhwanul Muslimin bermula dari kota Ismailiyah di Mesir dimana Hasan al-Banna pertama mendirikannya. Pada awal berdiri, gerakan Ikhwanul Muslimin dipusatkan di Kairo, dan tidak berapa lama kemudian telah menyebar ke seluruh wilayah di Mesir. Pada tahun 1941 gerakan Ikhwanul Muslimin masih beranggotakan 100 orang, hasil seleksi dari Hassan al-Banna. Akhir tahun 1940-an, sudah ada sekitar 3000 cabang Ikhwan yang ada di Mesir dan tiap cabang memiliki anggota yang besar.

Hingga tahun 1949 Ikhwanul Muslimin telah memiliki dua ribu cabang di seluruh Mesir dengan sekitar 500,000 anggota aktif dan sebagian kecilnya merupakan simpatisan gerakan

⁸ *Gaza: Hamas urges Egypt to reopen Rafah crossing*, BBC, 23 Agustus 2013, dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23809332>, [diakses pada tanggal 12 November 2013]

tersebut.⁹ Gerakan Ikhwanul Muslimin kemudian menyebarluas ke luar Mesir, cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di luar negeri yang pertama-tama adalah di Suriah, Palestina, Yordania, Irak, Yaman dan Libanon.

Ikhwanul Muslimin giat berpolitik di beberapa negara. Setelah pengaruhnya menyebar di berbagai negara muslim, Ikhwanul Muslimin mengklaim merupakan organisasi induk bagi beberapa gerakan politik Islam di negara-negara tersebut dan menyesuaikan namanya dengan nama lokal dengan tetap menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai inspirasi gerakannya. Beberapa organisasi yang mengaku memiliki manhaj yang sama dengan Ikhwanul Muslimin seperti Front Nasionalis (Sudan), Gerakan Orientasi Islam yang berubah menjadi Gerakan Kebangkitan (Tunisia), Gerakan Hamas dan berubah menjadi gerakan Masyarakat Damai (Aljazair), Gerakan Reformasi Kebangkitan dan Pembaharuan (Maroko) dan lain sebagainya.¹⁰

Dukungan Ikhwanul Muslimin terhadap Perjuangan Palestina

Ikhwanul Muslimin memiliki andil dalam mengobarkan semangat jihad di Palestina untuk melawan Israel dan sekutunya. Dukungan Ikhwanul Muslimin terhadap Palestina telah ditunjukkan sejak mula-mula organisasi ini berdiri. Tidak hanya Ikhwanul Muslimin, seluruh komponen Islam dan orang-orang non-Islam yang bersimpati pada Palestina mendukung perjuangan orang-orang Palestina untuk mendapatkan tanahnya kembali, untuk bebas dari blokade, untuk bebas dari agresi, untuk menjalankan

kehidupannya secara normal termasuk melaksanakan ibadah agama.

Interaksi mula-mula Ikhwanul Muslimin pada Palestina adalah ketika saudara Al-Banna mengunjungi Palestina pada awal tahun 1930-an. Perkembangannya, pada tahun 1946, Ikhwanul Muslimin telah membuka kantor pusatnya di Yerusalem sebagai bentuk kehadiran formalnya di tanah Palestina. Masalah Palestina menjadi salah satu alasan Ikhwanul Muslimin untuk meluaskan gerakannya di luar Mesir.¹¹

Hilangnya sebagian besar wilayah Palestina pada tahun 1948 dan digantinya teritori Palestina di bawah Yordania dan Mesir telah meningkatkan pengaruh Ikhwanul Muslimin di Palestina, membentuk perkembangannya dan menghubungkannya dengan dunia Arab. Di Tepi Barat, Ikhwanul Muslimin yang ada di sana bergabung dengan komunitas Ikhwanul Muslimin yang ada di Yordania secara keseluruhan. Sepanjang tahun 1967 dan setelahnya, Ikhwanul Muslimin telah menjadi partai politik yang resmi dan bertindak sebagai oposisi melawan kerajaan Hashemit.

Kenyataan menunjukkan bahwa antara tahun 1948 dan 1967, Ikhwanul Muslimin adalah satu-satunya organisasi politik yang tetap bertahan di Tepi Barat. Walaupun gerakan Ikhwanul Muslimin yang berkembang di Tepi Barat kurang memiliki tradisi militan yang kuat. Sementara itu, Ikhwanul Muslimin yang ada di Gaza lebih militan, mereka menghadapi kenyataan yang berbeda dengan saudaranya di Tepi Barat.

Beberapa tahun berikutnya, Ikhwanul Muslimin telah menjadi pergerakan politik yang paling terkenal

⁹ Sara Roy, *Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector*, Princeton University Press, New Jersey: 2011. Hal. 21

¹⁰ Abu Mush'ab As-Suri, *op.cit.*, hal. 15-16

¹¹ Sara Roy, *op.cit.*, hal. 20

di Gaza. Jumlah anggotanya ribuan, sebagian besar mereka berprofesi sebagai mahasiswa dari kamp-kamp pengungsian. Sebagaimana ciri khas Ikhwanul Muslimin pada umumnya, di Gaza mereka menunjukkan tindakan politik konfrontasi dan tindakan bersenjata dengan pemerintah yang tidak islami.

Memasuki tahun 1950-an, Ikhwanul Muslimin keluar dari panggung politik dan lebih fokus pada perbaikan masyarakat. Mereka kemudian menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda. Perang 1967 juga tidak mengubah pemikiran Ikhwanul Muslimin namun sedikit menambah semangatnya. Ikhwanul Muslimin di Gaza menghadapi dilema apakah mereka akan tetap berada di mesjid atau harus turut serta dalam perang melawan Israel dimana pihak nasional yang dipimpin Gamal Abdul Nasser telah kalah.

Kekalahan Arab pada Perang 1967 di satu sisi telah membangkitkan pergerakan Islam di sisi lain dan ini berdampak pada perkembangan Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah pergerakan Islam dari awalnya. Kontak antara Ikhwanul Muslimin di Gaza dan di Tepi Barat tetap berlangsung dari tahun 1960-an hingga 70-an walau kedua wilayah tersebut berada di bawah kontrol administrasi Israel.

Ikhwanul Muslimin mulai menunjukkan perlawanan berkelanjutan pada Israel sejak tahun 1980-an. Dua dekade sebelum itu, komunitas-komunitas gerakan Islam di Palestina tidak melakukan konfrontasi dan mereka dapat beraktivitas tanpa dihalangi Israel sebagai pihak yang menguasai administrasi di Palestina. Mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, melalui bidang pendidikan, sosial dan sebagainya,

namun sejak 1980-an mereka mulai melawan terhadap pendudukan Israel.

Gerakan perlawanan Israel dimulai dari kalangan terpelajar yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, mereka berasal dari kampus-kampus Islam, dan di awal tahun 1980-an, gerakan jihad Islam dibentuk di Gaza yang dipimpin orang-orang yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, sejak tahun-tahun itu juga mereka tidak menunjukkan identitas sebagai anggota Ikhwanul Muslimin secara terbuka karena organisasi induk Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir menerapkan strategi sementara tidak melawan Israel.

Periode tahun 1983 hingga 1987 ditandai dengan fase persiapan langsung perlawanan melawan pendudukan Israel termasuk melakukan perlawanan bersenjata dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin yang utama pada saat itu salah satunya adalah Sheikh Ahmad Yassin yang memimpin beberapa perjuangan di Gaza. Dia juga menjadi pendiri HAMAS yang secara institusional telah menggantikan kehadiran Ikhwanul Muslimin pada Desember 1987.

The Islamic Resistance Movement atau *Harakat al-Muqawama al-Islamiyya* (HAMAS) istilah *Hamas* dalam bahasa Arab juga berarti semangat.¹² Lahirnya HAMAS bersamaan dengan Perjuangan (Intifada) pertama pada Desember 1987 (kapan HAMAS tepatnya berdiri masih menjadi perdebatan hingga kini).

Rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-haknya yang telah direbut agresor Israel melakukan berbagai cara, aksi yang sangat penting adalah intifada. Intifada terjadi dua kali, intifada pertama terjadi dari tahun 1987

¹² *Ibid.*, hal. 19

hingga 1993, Intifada pertama terjadi di Jalur Gaza dan Tepi Barat untuk melawan agresi Israel terhadap wilayah tersebut, Intifada pertama mengawali aksi serangan bunuh diri di Palestina. Intifada pertama berakhir tahun 1993 dengan dibuatnya Kesepakatan Oslo di tahun tersebut.

Tahun 2000 mengawali aksi Intifada kedua, yang disulut oleh kunjungan Jenderal Israel saat itu, Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa yang berada di bukit suci, pihak Muslim menganggap kunjungan tersebut sangat bermotif provokasi diduga Israel ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan menggantinya dengan tempat ibadah Yahudi. Sehingga menimbulkan protes keras dari pihak Muslim yang menciptakan gerakan Intifada kedua. Intifada kedua ini banyak yang menganggapnya belum berakhir hingga sekarang.

Intifada pertama adalah masa-masa kritis bagi sejarah Hamas di Palestina karena di masa-masa tersebutlah HAMAS terbentuk dan menjadi sayap organisasi Ikhwanul Muslimin di Palestina. Sedangkan di peristiwa Intifada kedua, Palestina secara politik dan administrasi telah dibagi dua, dimana HAMAS memerintah wilayah Gaza sedangkan Fatah memerintah Tepi Barat. Perkembangan tersebut menyebabkan dukungan Ikhwanul Muslimin lebih terasa di wilayah Gaza karena kedekatan ideologis dengan HAMAS yang memerintah Gaza.

Sejarah HAMAS tidak terlepas dari Ikhwanul Muslimin yang pertama berkembang di Mesir dan perhatian Ikhwanul Muslimin pada masalah Palestina. HAMAS mewakili kepentingan politik Islam di Palestina, dan perpanjangan tangan gerakan Ikhwanul Muslimin di tanah Palestina yang berkembang pesat di wilayah

Gaza. Di Gaza, HAMAS berperan sebagai penguasa administratif (*administrative rulers*) dan membuka kesempatan bagi setiap pihak untuk berkontribusi pada pembangunan di Gaza.¹³

Transisi politik yang dimainkan HAMAS termasuk perlawanan yang dilakukannya bertujuan untuk melengkapi dan bukan mengganti identitas lama yang sudah dibangun Ikhwanul Muslimin. Anggota-anggota Ikhwanul Muslimin yang tidak setuju dengan HAMAS tetap bergabung dengan Ikhwanul Muslimin tapi mereka yang setuju dengan metode perlawanan yang dikembangkan HAMAS memilih bergabung dengan HAMAS tanpa menanggalkan keanggotaan Ikhwan mereka. Sehingga HAMAS berbeda dengan Ikhwanul Muslimin secara struktural namun memiliki kedekatan ideologis yang sangat kuat.

Masuk ke abad 21, HAMAS mengalahkan Fatah pada pemilu konstitusional tahun 2006, dengan kemenangan 42% suara. Kemenangan HAMAS membuat Israel gerah, HAMAS adalah kekuatan yang susah dikalahkan Israel sehingga Israel melakukan blokade perdagangan di Gaza dan Tepi Barat sebagai protesnya kemenangan HAMAS. Namun, perkembangan politik di Palestina telah menjadikan sistem politik di Palestina terbagi dua sejak tahun 2007, Gaza yang dikontrol HAMAS sedangkan Tepi Barat di bawah kontrol Fatah. Namun, bukan tempatnya dalam tulisan ini untuk memperdalam pertentangan kedua faksi Palestina tersebut.

Mesir bereaksi atas isu domestik yang ada di Palestina, terutama ketika Gaza di blokade total yakni blokade darat, laut maupun udara. Blokade ini telah menyebabkan impor barang ke

¹³ *Ibid.*

Gaza menurun drastis 80%. Selama Mesir berada di bawah pemerintahan militer, perjuangan Ikhwanul Muslimin terhadap Palestina tidak pernah surut. Namun perjuangan tersebut tetap memiliki kendala dalam soal gerakan yang tidak begitu bebas. Mengingat Mesir dan Israel masih dalam perjanjian penutupan perbatasan Rafah.¹⁴

Sikap Ikhwanul Muslimin terhadap isu Palestina berubah ketika Mesir berada di bawah pemerintahan Mursi yang merupakan kader Ikhwanul Muslimin. Pemerintahan yang hanya berjalan kurang dari satu tahun memiliki kesempatan besar memberi dukungan terhadap Palestina. Dukungan terhadap Palestina tidak dihambat seperti yang pernah terjadi di masa Mubarak dimana Mesir turut andil dalam memblokade wilayah Palestina (Gaza) sehingga mobilitas ke Gaza sangat sedikit, rezim Mubarak hanya membuka perbatasan pada jam-jam tertentu dan hanya pada orang-orang tertentu. Faktor lain adalah rezim Mubarak tidak menginginkan Hamas terlalu berkuasa di Gaza.¹⁵ Ketika rezim Mubarak tumbang, rakyat Gaza menyambut dengan gembira, dan mereka berharap rezim baru akan menghilangkan blokade terhadap wilayah Gaza.

Ikhwanul Muslimin tidak memiliki legitimasi untuk mengatur tindakan apa yang harus dilakukan Mursi terhadap Palestina, namun mereka dapat menjadi kelompok kepentingan yang mempengaruhi keputusan pemerintah Mesir terhadap perjuangan Palestina, mereka dapat memberikan bantuan kemanusiaan, dukungan moril, kampanye

kemanusiaan bahwa di Palestina sedang terjadi krisis kemanusiaan yang berlangsung sangat lama yang didalamnya bermain kepentingan Israel dan pemimpin-pemimpin Arab yang tunduk pada Israel dan sekutunya.

Pemimpin Mesir dan Ikhwanul Muslimin memiliki prioritas yang berbeda-beda. Ikhwanul Muslimin tidak bisa menentukan arah kebijakan luar negeri Mesir untuk memprioritaskan perjuangan Palestina, termasuk HAMAS juga tidak bisa menjadi penentu kebijakan pemerintahan Mursi. Mursi tidak bisa bersikap langsung agresif dengan Israel. Secara sederhana hubungan antara Mesir dengan Gaza akan berubah menuju pada siapa yang dapat memberikan kepentingan yang paling baik kepada penduduk Palestina maupun Mesir. Di masa Mursi, Mesir menghilangkan blokade dan menutup semua penyelundupan senjata melalui terowongan-terowongan ke Gaza.

Sikap umum Ikhwanul Muslimin terhadap beberapa isu sangat jelas, dan pihak-pihak yang mengikuti Ikhwanul Muslimin memiliki sikap yang hampir sama dengan organisasi tersebut. Ikhwanul Muslimin bersikap non-kooperatif dengan Barat, sikap ini juga sedikit tampak ketika Mursi memimpin Mesir. Mursi berencana mengubah arah politik luar negeri Mesir namun tidak dengan cara-cara yang radikal.

Langkah-langkah berarti kader Ikhwanul Muslimin terhadap perjuangan Palestina sedikit membuahkan hasil di tahun 2012. Didahului operasi penyerangan Israel ke Gaza pada November 2012 yang dikenal dengan *Operation Pillar of Defence*, jumlah warga Palestina yang gugur menurut *Palestinian Center for Human Rights*, adalah sebanyak 158 orang, 102 diantaranya adalah penduduk sipil, sedangkan korban dari

¹⁴ *Hamas' Relations With Egypt Change with Morsi's Leadership*, dalam <http://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/politics/2012/08/the-fight-against-tunnels-and-we.html> [diakses pada 12 November 2013]

¹⁵ *Ibid.*

pihak Israel adalah sebanyak enam orang, empat diantaranya adalah warga sipil. Penyerangan sewenang-wenang Israel ini telah menyebabkan PBB mengambil tindakan, pada 29 November, Palestina diberikan status sebagai negara anggota peninjau di PBB, yang berarti Palestina telah dianggap sebagai negara berdaulat. Banyak pihak yang menilai, diangkatnya Palestina sebagai anggota peninjau di PBB berkat keberhasilan diplomasi yang dijalankan Muhammad Mursi sebagai kader Ikhwanul Muslimin.¹⁶

Ikhwanul Muslimin bagaimanapun tidak berfokus pada urusan Palestina baik ideologinya maupun tujuan pergerakannya. Ikhwanul Muslimin berfokus pada pengembangan ide-ide al-Banna dan Quthb dalam menciptakan masyarakat yang diperintah oleh aturan hukum syariat dari sebuah negara Islam yang banyak disebut ingin menciptakan kembali bentuk negara kekhalifahan.¹⁷ Sekali lagi, orientasi Ikhwanul Muslimin bukan Palestina namun isu Palestina menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan Ikhwanul Muslimin di seluruh tempat persebarannya.

Sepanjang sejarah kehadirannya, Ikhwanul Muslimin di Palestina telah banyak melakukan upaya-upaya moderat, pembangunan fasilitas-fasilitas masyarakat, pengembangan sekolah-sekolah agama modern, semi modern dan tradisional, organisasi-organisasi pendukung pergerakan dan pengembangan lainnya sangat banyak di Gaza. Para Ikhwan bertindak sebagai aktor sosial juga selain sebagai pendakwah dan politisi, mereka mempromosikan kehidupan islami ke

dalam masyarakat Gaza, narkoba alkohol dilarang, termasuk perjudian prostitusi dan perilaku amoral yang merusak masyarakat ditekan habis. Sehingga norma-norma yang sekarang berkembang di Gaza tidak terlepas dari kampanye yang dilakukan Ikhwan.

Kebijakan Pemerintah Mesir Terhadap Palestina Tahun 2011-2013

Pasca kemenangan *Free and Justice Party (FJP)* dalam Pemilu Mesir, yang mengusung Muhammad Mursi telah merubah arah kebijakan politik luar negeri Mesir. Setidaknya terhadap dukungan Mesir dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut secara jelas diutarakan oleh Muhammad Mursi dalam pidato pertamanya menjadi Presiden Mesir. Mursi sendiri dalam pidatonya berjanji akan menjaga semua perjanjian dengan semua negara. Saling menghargai satu sama lain dan Mursi pun berjanji tidak akan mengizinkan adanya intervensi asing dalam politik dan kebijakan negara Mesir.

“Apabila saya tidak melaksanakan semua janji-janji saya, maka janganlah patuhi saya.”¹⁸

Salah satu janji dari Mursi dalam masa kampanye adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina. Kemudian Mursi juga menegaskan bahwa tidak akan ada lagi intervensi asing.

“Saya akan menjaga semua perjanjian dengan semua negara. Saling menghargai. Saya tidak izinkan intervensi asing.”¹⁹

Kemudian dukungan tersebut dia tegaskan kembali dalam Sidang Umum PBB yang ke 67 di New York Amerika Serikat. Hal ini secara tegas ia

¹⁶ Muhammad Zahid, *The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis*, Tauris Academic Studies, London: 2010. Hal. 69

¹⁷ Abu Mush'ab As-Suri, *op.cit.*, hal. 72

¹⁸ Dari Rezim ke Transisi Menuju Solusi <http://ilmuwanmuda25.blogspot.com/2012/06/dari-rezim-ke-transisi-menuju-solusi.html>. [Diakses pada tanggal 12 januari 2013]

¹⁹ *Ibid*

sampaikan dalam pidatonya pada sidang umum PBB yang ke 67 di New York Amerika Serikat. Karena selama ini status Palestina di lembaga internasional PBB hanya peninjau. Pernyataan serupa terkait dengan kemerdekaan Palestina, tidak hanya di sidang umum PBB tapi juga dia sampaikan dalam pertemuan menteri luar negeri anggota Liga Arab di Ibu Kota Kairo, Mesir. Menurut Mursi Palestina menjadi isu sangat penting bagi kemajuan negara-negara Arab.²⁰

Presiden Mesir Muhammad Mursi bertemu Pemimpin Hamas Palestina Khaled Meshal membicarakan perkembangan upaya kemerdekaan Palestina. Perjuangan kemerdekaan tersebut telah lama dimulai dan pada masa Muhammad Mursi menjadi presiden Mesir mengalami perkembangan yang cukup baik. Harapannya dalam waktu dekat perjuangan tersebut bisa tercapai dan Palestina bisa menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya.²¹

Dalam hubungan antara Mesir dan Palestina, Mesir mencoba dengan segala upaya membantu Palestina agar mendapat haknya sebagai negara merdeka. Presiden Palestina Mahmud Abbas (Faksi Fatah) bertemu dengan Duta Besar Mesir untuk Palestina Yassir Othman di Istana Presiden Palestina di Ramallah. Abbas dan Othman membahas perkembangan terbaru, terutama setelah peningkatan status Palestina di PBB sebagai negara

pengamat non-anggota dan rekonsiliasi nasional di Mesir.²²

Otoritas bandara udara Mesir memberikan izin kepada warga Palestina untuk memasuki negara tersebut dengan bebas tanpa penggunaan visa. Kebijakan ini sekaligus mengakhiri blokade lima tahun Negeri Piramida di Jalur Gaza. Kebijakan pembebasan masuk warga Palestina ini menandakan, mereka dapat dengan bebas meninggalkan Jalur Gaza. Kebijakan ini juga berlaku bagi warga Palestina yang berada di Tepi Barat dan Yerusalem.²³

Perbatasan Rafah Dibuka Kembali untuk warga yang terkatung-katung selama ini di luar Jalur Gaza. Perlintasan darat Rafah dibuka untuk lalu lintas musafir dari dua arah. Pihak Palestina berharap perlintasan Rafah ini dibuka secara normal dalam beberapa waktu ke depan. Mengisyaratkan bahwa kontak kini sudah dilakukan terus menerus dengan pihak Mesir untuk membuka perlintasan dari dua arah. Namun Pihak Palestina menegaskan, Mesir tidak menyampaikan secara resmi hingga sekarang jadwal pembukaan perlintasan Rafah bagi musafir dari Jalur Gaza yang ingin keluar.²⁴

Pemerintah menegaskan sikap konsisten mereka terkait rekonsiliasi sebagai pilihan rakyat Palestina, namun kondisi saat ini sangat bertentangan dengan substansi rekonsiliasi dan tidak

²⁰ Teks Pidato Mursi di Sidang Umum PBB <http://al-ikhwan.net/kiprah-presiden/teks-pidato-mursi-di-sidang-umum-pbb> [Diakses pada tanggal 12 januari 2013]

²¹ Presiden Mesir Bertemu dengan Pemimpin HAMAS <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/07/20/m7fu8w-presiden-mesir-bertemu-dengan-pemimpin-hamas> [Diakses pada tanggal 12 januari 2013]

²² Dubes Mesir temui Abbas Bahas Perkembangan Status Palestina <http://mirajnews.org/id/asia/1024-dubes-mesir-temui-abbas-bahas-perkembangan-status-palestina.html> [diakses pada tanggal 12 januari 2012]

²³ Warga Palestina di izinkan Masuki Mesir tanpa Visa <http://internasional.rmol.co/read/2012/07/24/72096/Warga-Palestina-Diizinkan-Masuki-Mesir-Tanpa-Visa-> [Diakses pada tanggal 12 januari 2013]

²⁴ Perbatasan Rafah dibuka Kembali <http://al-ikhwan.net/akbar-dunia-islam/perbatasan-rafah-dibuka-kembali> [Diakses pada tanggal 12 januari 2013]

mencerminkan keseriusan Fatah dalam menyuksekkannya. Dalam konteks yang sama, pemerintah Palestina menyerukan kepada pimpinan Mesir untuk mempermudah proses perjalanan warga dari dan menuju Gaza, demikian pula mereka yang terdampar di sejumlah negara Arab dan proses kepulangan mereka melalui bandara internasional Kairo.

Simpulan

”Musim Semi” Arab atau *Arab Spring* yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah merubah semua sisi kehidupan politik di kawasan tersebut. Salah satunya adalah Mesir, Mesir pasca Revolusi 2010 lalu telah merubah tatanan politik negara tersebut. Awalnya otoriter berubah menjadi demokrasi yang terbuka yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Mesir. Pemilihan umum yang diselenggarakan Mesir terpilihlah Muhammad Mursi sebagai Presiden yang memimpin Mesir kedepannya.

Mursi yang maju dalam pemilihan presiden Mesir di usung oleh salah satu partai yaitu *Free and Justice Party* (FJP). FJP sendiri merupakan sayap politik dari Ikhwanul Muslimin. Sedangkan Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan salah satu organisasi yang sangat berpengaruh di Mesir. Bahkan pengaruh Ikhwanul Muslimin tidak hanya di Mesir saja tapi juga di beberapa negara lain seperti Yordania, Sudan, Palestina, Suriah, Yaman dan Libanon.

Ekspansi Ikhwanul Muslimin ke berbagai negara di luar Mesir telah menjadikan organisasi ini semakin besar, pada tahun 1987 berdiri partai HAMAS (*Harakat al-Muqawama al-Islamiyya*) di Palestina yang merupakan sayap Ikhwanul Muslimin. Kehadiran HAMAS membuat Ikhwanul Muslimin

semakin merasa terikat dengan perjuangan rakyat Palestina.

Terpilihnya Mursi kader Ikhwanul Muslimin dalam Pemilu demokratis Mesir membuat banyak perubahan dari presiden sebelumnya Husni Mubarak. Mursi lebih memprioritaskan kepentingan Rakyat Mesir dan Timur Tengah serta negara-negara Islam daripada negara Barat (Amerika dan Eropa), tanpa menutup diri dengan barat. Sementara pendahulunya Husni Mubarak terlihat lebih pro kepada barat. Bahkan bekerjasama dengan Israel (sekutu barat) dalam memblokade Palestina .

Kebijakan Mesir ialah mengizinkan warga Palestina masuk Mesir tanpa visa. Kemudian membuka akses di perbatasan Mesir-Palestina selama 24 jam yang sebelumnya di blokade pada masa Husni Mubarak. Selain itu Mesir pada masa Muhammad Mursi juga menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Palestina. Kemudian dalam berbagai forum internasional Mursi selalu mengkampanyekan dukungan Mesir terhadap perjuangan kemerdekaan palestina. Berdasarkan berbagai tindakan dan kebijakan yang diambil Mesir terlihat dengan jelas bahwa Mesir mendukung sepenuhnya perjuangan kemerdekaan Palestina.

Referensi

A. Najiyullah.2002.*Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.

Abu Mush'ab As-Suri, penerj. Agus Suwandi.2009.*Perjalanan Gerakan Jihad (1930-2002), Sejarah Eksperimen, dan Evaluasi*, Solo: Jazera.

- Agung Banyu Perwita dan Yayan M. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bin Muhammad bin Ali Jabir, Hussain. 2005. *Menuju Jama'atul Muslimin, Telaah Sistem Jamaah dalam Gerakan Islam*, Jakarta: Robbani Press.
- Ganewaty Wuryandar dkk. 2008. *Politik luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Holsti, K.J. 1998. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, terj. M. Tahir Azhary, SH. Jakarta; Erlangga.
- Jensen, Lloyd. 1982. *Explaining Foreign Policy*. Prentice Hall, Temple University.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan internasional dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.
- May Rudy, Teuku. 2001. *Teori, Etika Dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Nasution, Dahlan. 1991. *Politik Internasional konsep dan teori*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Plano, Jack. C. and Roy Olton. 1969. *The International Relations Dictionary*. New York: Holt Rine Hart and Winston, Inc.
- Raourke, John T. 2001. *International Politics on The World stage*. USA: University of Connecticut.
- Roy, Sara. 2011. *Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector*, New Jersey: Princeton University Press.
- R. Suprpto. 1997. *Hubungan Internasional: Sistem, interaksi dan Prilaku*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Russett, Bruce & Harvey Starr. 1998. *World Politics: Menu For Choice*, 2nd ed, New York: W.H. Freeman and Co.
- Rosenau, James N., Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: the Free Press.
- Snyder et.al. dalam Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press.
- WAMY : Gerakan Keagamaan dan Pemikirannya
- Yusuf, Sufri. 1989. *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Zahid, Muhammad. 2010. *The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis*, London: Tauris Academic Studies.
- Agung Nugho, Dukungan China terhadap Program Nuklir Iran tahun 2006-2011.
- Arab-Israel Timeline, dalam www.icsresources.org

Congressional Research Service, *Egypt: Background and US. Relations*,

Hamas' Relations With Egypt Change with Morsi's Leadership, dalam <http://www.al-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/politics/2012/08/the-fight-against-tunnels-and-we.html>

Konsep kebijakan politik luar negeri. <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=konsep%20kebijakan%20politik%20luar%20negeri&source=web&cd=23&ved=0CgQFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Felib.pdii.lipi.go.id%2Fkatalog%2Findex.php%2Fsearchkatalog%2FdownloadDatabyId%2F1673%2F1674.pdf&ei=qEXT87MKbCfmQXAtZXQAw&usq=AFQjCNGnkRxFOqhiB3CV98dOSr6UhKTNYg&cad=rja>

Luerdi, *Kebijakan Keamanan Nasional Pakistan (Pakistan's Strategic Option) sebagai Respon Perjanjian Nuklir Sipil India-AS tahun 2005-2007*.

Middle East Policy Council, *Egypt Opens Its Border with Gaza*, dalam <http://www.mepc.org/articles-commentary/commentary/egypt-opens-its-border-gaza?print>,

Morsi's Iran speech Reasserts Egypt's Regional Role, dalam <http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/politics/2012/09/political-messages-in-iran-morsi-speech.html>

Peranan-Politik-Luar-Negeri-RI-Dalam-Percaturan-Internasional

<http://www.scribd.com/doc/68254972/Peranan-Politik-Luar-Negeri-RI-Dalam-Percaturan-Internasional-6>

Teori-Politik-Luar-Negeri <http://www.docstoc.com/docs/82805440/Teori-Politik-Luar-Negeri>

The Blockade Timeline, dalam www.icsresources.org

atjehpost.com
al-ikhwan.net
internasional.rmol.co
indonesianvoices.com
kamusbahasaindonesia.org
mirajnews.org
www.voiceofpalestine.net
www.fjponline.com
www.fimadani.com
www.republika.co.id
www.bbc.co.uk
www.id-muslim.com